

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga berkaitan dengan anggaran pendapatan yang terdapat di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana secara umum anggaran didalam BUMD berasal dari kekayaan daerah yang telah dipisahkan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, sebagaimana BUMD memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan terhadap perekonomian di suatu daerah dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun terdapat kekurangan terhadap kinerja pembagian BUMD sehingga dirasa masih sedikit memprihatinkan di beberapa daerah.

Anggaran daerah sangat mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan daerah itu sendiri dan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebagai bentuk untuk memajukan kesejahteraan kabupaten serta untuk mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab diantara fungsi-fungsi dalam pemerintahan daerah agar dapat bertindak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan daerahnya tersebut. Selain itu disusunnya laporan keuangan tidak terlepas dari yang namanya prasyarat untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yaitu dengan melakukan reformasi dalam menyajikan laporan keuangan. Dimana akuntabilitas sendiri singkatnya

dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam mencapai suatu sasaran yang telah ditargetkan. Dalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan daerah akuntabilitas dapat sebagai pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah tersebut. Sedangkan transparansi sendiri merupakan suatu keterbukaan dalam memberikan maupun dalam menyusun laporan keuangan daerah, dimana kebijakan dalam menyusun laporan keuangan diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan daerah.

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tinjauan yang telah ditetapkan secara berkala. Akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau untuk menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau tanggung jawab yang berkewenangan untuk meminta keterangan mengenai pertanggungjawaban. (Annisaningrum, 2010)

Sedangkan transparansi sendiri yaitu suatu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dimana perwujudan tata pemerintahan yang baik bagi masyarakat yaitu adanya keterbukaan, keterbukaan, dan keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan

pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. (Hari Sabarno, 2010).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terdapat perbedaan mengenai akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Risya Umami (2017) bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan laporan keuangan desa, baik secara simultan berpengaruh, sedangkan Sri Lestari (2017) menemukan adanya pengaruh yang tidak signifikan antara akuntabilitas dan transparansi namun harus tetap mendapat bimbingan dari pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Risya Umami (2017) dan Ibnu Wardhana (2016) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi pengaruh dalam pengelolaan laporan keuangan. Sedangkan penelitian oleh Siti Khusniyatun (2016) bimbingan secara teknis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Research gap atau temuan yang berbeda-beda dari penelitian terdahulu dapat diringkas pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Research Gap

NO	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel		
		Akuntabilitas	Transparansi	Simultan
1.	Suryaningsih Loi (2015)	Berpengaruh positif	Tidak berpengaruh positif	Berpengaruh positif
2.	Ibnu Wardhana (2016)	Berpengaruh positif	Tidak diteliti	Berpengaruh positif
3.	Siti Khumsiyatun (2016)	Berpengaruh positif	Tidak diteliti	Berpengaruh positif
4.	Sri Lestari (2017)	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif namun harus tetap dalam pengawasan
5.	Risya Ummami (2017)	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif	Berpengaruh positif

Secara umum prinsip dari akuntabilitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan suatu pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atas norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para pemangku berkepentingan (*stakeholders*) yang memiliki kepentingan dengan pelayanan itu. Setelah semua langka-langkah dilakukan langkah terakhir yaitu adalah menyusun laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) oleh seorang bendahara, lalu diserahkan kepada atasan langsung (sekertaris) dan dibantu oleh beberapa staf pengelola keuangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut selanjutnya diperiksa langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan selanjutnya dokumen-dokumen yang berhubungan dan telah disediakan secara lengkap.

Indonesia sendiri ada banyak kasus yang menunjukkan fakta bahwa masih ada beberapa daerah yang memiliki kontribusi minim terhadap Pendapatan Asli Daerah. Padahal jelas diketahui bahwa suntikan dana melalui APBD terus diberikan secara berkala. Seperti pada kasus korupsi dana APBD daerah Pati yang terjadi di Kabupaten Pati pada tahun 2003, Bupati Kabupaten Pati pada masa jabatan tersebut diketuai oleh Tasiman. Kasus tersebut bisa tersulut berkat penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban yang mengalami kerugian mencapai 250 juta hasil dari kerugian tersebut diusut ternyata dibagikan kepada anggota-anggota dewannya. (liputan6.com)

Kasus tersebut menunjukkan jika manajemen BUMD belum dapat dikatakan dikelola dengan baik karena belum terlaksananya fungsi perencanaan dan pengendalian dan masih belum memahami sepenuhnya terhadap prinsip dari akuntabilitas dan transparansi terhadap anggaran APBD. Sebagai penerima dana APBD seharusnya dapat melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran, yang mana hasil dari ketiga faktor penting tersebut yaitu dengan dibuat laporan pertanggungjawaban sebagai catatan dari hasil kinerja dari pengelolaan dana tersebut.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah, oleh karena itu setiap kabupaten harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Keterbukaan merupakan data atau informasi bagi masyarakat yang dapat di akses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan dapat juga menunjuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Hal ini dapat menciptakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (*horizontal accountability*) antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terwujud pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Laporan Keuangan Daerah pada Kabupaten Pati”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan daerah pada Kabupaten Pati?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan daerah pada Kabupaten Pati?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan daerah pada Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diperoleh yaitu:

1. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap penyusunan laporan keuangan daerah pada Kabupaten Pati.
2. Mengetahui pengaruh Transparansi terhadap penyusunan laporan keuangan daerah pada Kabupaten Pati.
3. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi secara bersama-sama terhadap penyusunan laporan keuangan daerah pada Kabupaten Pati.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan atau menambah wawasan dibidang penganggaran pada sektor publik terutama pada permasalahan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam menyusun laporan keuangan daerah, sehingga diharapkan ada pihak yang makin mengetahui bahwa anggaran yang baik dapat membantu terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan daerah. Hal tersebut juga agar masyarakat dapat lebih peka terhadap kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegawai Kabupaten Pati

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan di Kabupaten Pati dalam mengambil suatu keputusan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas anggaran yang telah dibuat, sehingga anggaran yang sudah dibuat dapat mencapai sasaran yang dituju, dan juga dapat terhindar dari tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak.

b. Bagi Pihak Lain

Diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dapat bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penulisan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yang kemudian digambarkan dalam kerangka pemikiran penelitian serta perumusan hipotesisnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang variabel dalam penelitian dan definisi operasionalnya, menentukan populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penelitian, pengujian kualitas data, analisis data, hasil dari analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya.

